

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian seagai berikut.

1. Sebelum lahirnya Demokrasi Terpimpin, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi Parlementer terlihat dengan banyaknya Kabinet yang ada pada masa itu. Sebanyak tujuh kabinet berganti-ganti dan setiap kabinet hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun. Pergantian yang terjadi pada kabinet mengakibatkan perubahan terhadap semua aspek-aspek yang ada pada negara Indonesia. Salah satu aspek yang berubah adalah aspek militer. Dalam dunia militer, perubahan terjadi akibat pergantian-pergantian kabinet pada masa demokrasi Parlementer. Salah satu elemen militer pada waktu itu adalah Kepolisian Negara. Kepolisian merupakan bagian dari militer yang mendapatkan kedudukan dan tugas tersendiri. Kedudukan, status, maupun organisasi Kepolisian jga berubah karena adanya perubahan kabinet yang terjadi ada pemerintahan pusat. Hal itu ditunjukkan dengan perubahan nama dari Jawatan Kepolisian Indonesia menjadi Jawatan Kepolisian Negara. Selain itu pada tingkat-tingkat dibawah Jawatan pusat juga terdapat perubahan seperti pembentukan kantor-kantor Polisi baru di daerah-daerah. Selain kedudukan, tugas Kepolisian juga disebutkan dalam masa ini. Tugas dan kewajiban dari Kepolisian Negara tidak jauh berbeda dalam upaya keamanan

dalam negeri. Hal itu ditunjukkan dengan berperannya Kepolisian dalam operasi-operasi kemanan pada penumpasan sisa-sisa kolonialis Belanda, operasi penumpasan DI/TII, dan operasi penumpasan PRI/Permesta.

2. Demokrasi Terpimpin merupakan masa setelah berakhirnya Demokrasi Parlementer. Demokrasi Terpimpin lahir ditengah situasi carut marutnya negara dari permasalahan intern dan ekstern. Permasalahan intern ditunjukkan dengan adanya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Sulawesi serta pemberontakan RMS di Maluku. Sedangkan permasalahan ekstern ditunjukkan dengan belum terselesaikannya permasalahan Irian Barat dengan Kerajaan Belanda. Kegagalan kabinet yang berulang-ulang jatuh bangun mengakibatkan Presiden tidak menemukan kecocokan dengan paham liberal, karena pada masa Demokrasi Parlementer liberalise masuk dengan bebasnya dan mengakibatkan kacaunya pemerintahan. Dengan bantuan dari Perdana Menteri Djuanda, Presiden Soekarno menyongsong sistem pemerintahan baru yang disebut Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin lahir dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Sementara. Demokrasi Terpimpin mengakibatkan otoriteritas dari Presiden Soekarno karena memegang kepemimpinan secara tunggal. Untuk memperkuat kepemimpinannya, maka Presiden Soekarno memegang tanggung pemerintahan disegala bidang dengan kekuasaan tunggalnya. Salah satu upaya Presiden Soekarno untuk memperkuat kekuasaannya adalah dengan cara memperkuat aspek militernya. Kepolisian merupakan bagian dari militer di

Indonesia. Pada masa ini, militerisasi dilakukan pada tubuh Kepolisian dengan adanya integrasi Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain itu Kepolisian juga mengalami perubahan, seperti pergantian Kepala Kepolisian Negara. Pada masa ini anggota ABRI diperbolehkan menduduki jabatan pada pemerintahan (Dwifungsi ABRI), termasuk para perwira Kepolisian yang duduk di kursi pemerintahan.

3. Dinamika dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin diawali dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 19/1961. Undang-undang tersebut mempertegas status Kepolisian yang dapat menempati di posisi Kehakiman sebagai penegak hukum. Selain itu Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Integrasi ke dalam tubuh ABRI dilakukan untuk memperkuat militer Indonesia. Selain itu dengan bergabungnya Kepolisian dengan Angkatan lain diharapkan dapat mempererat dan mempermudah dalam penyelesaian permasalahan keamanan dalam negeri. Organisasi Kepolisian juga dirombak dan diganti pada masa ini. Status Kepolisian dipertegas dengan pembentukan organisasi dibawah tingkat pusat. Pergantian nama Mobiele Brigade berubah menjadi Brigade Mobil seperti yang dikenal hingga sekarang. Selain itu juga didirikanlah Sekolah-sekolah Kepolisian guna mencetak perwira-perwira Kepolisian yang pada masa ini sangat dibutuhkan untuk keperluan keamanan dalam negeri.

4. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana permasalahan keamanan dalam negeri banyak terjadi di Indonesia. dalam permasalahan tersebut, diperlukan kekuatan militer untuk penyelesaian. Kekuatan militer di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. kesatuan Angkatan tersebut berada dibawah satu komando yaitu Panglima Presiden Soekarno. Kepolisian yang tergabung dalam ABRI ikut berperan dalam penumpasan atau operasi-operasi yang terkait dengan keamanan Indonesia. operasi-operasi tersebut antara lain Operasi Penumpasan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TI), Operasi Tri Komando Rakyat (Trihora), Operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora), dan Operasi Penumpasan Gerakan 30 September. Selain berperan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri, Kepolisian juga memiliki tugas untuk melindungi Presiden. Untuk menjaga Presiden dari keselamatannya dan percobaan pembunuhan yang beberapa kali terjadi, angkatan Kepolisian memiliki peran dalam hal tersebut. sehingga Kepolisian ada masa Demokrasi Terpimpin memiliki andil yang sangat terlihat sebagai kesatuan yang menjaga keamanan negara dan rakyat Indonesia.